

ANALISIS: PANDANGAN TERHADAP IMPLEMENTASI AGAMA YANG DIJADIKAN ALAT POLITIK DI INDONESIA- MALAYSIA

Oleh: Dimas Supriyadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, tercatat bahwa Indonesia memiliki populasi muslim sebesar 86,7% dan di Malaysia sebesar 61,3% populasi muslim negeri Jiran tersebut.¹ Dengan dominasi muslim di kedua negara tersebut, mempengaruhi kultur yang berkembang di kedua negara, baik sosial, budaya, hukum dan juga politik. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan populasi muslim terbesar di Asia Tenggara, telah menunjukkan bagaimana agama Islam dapat mempengaruhi kebijakan dan politik.

Di Indonesia, Islam dan politik sangat erat hubungannya, politik dipandang sebagai sarana untuk melindungi umat Islam. Tanpa politik, umat Islam mungkin merasa terkekang dan tidak memiliki kebebasan atau kemandirian untuk menegakkan hukum Islam. Meskipun Indonesia secara resmi merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, pemikiran politik Islam masih berusaha untuk memperjuangkan implementasi hukum Islam pada sistem hukum negara. Hal ini mencerminkan bagaimana agama Islam dapat digunakan sebagai alat dalam politik. Demikian pula di Malaysia, pengembangan dan implementasi kebijakan politik Islam mempunyai dampak yang signifikan terhadap pluralisme dalam negeri. Gerakan politik Islam di Malaysia telah berkembang dan beradaptasi seiring berjalannya waktu, mencerminkan pentingnya peran agama dalam proses legislatif dan peraturan di negara tersebut.

Menggunakan agama sebagai alat politik adalah subjek yang kompleks dan kontroversial. Pendapat mengenai hal ini dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Menggunakan agama sebagai alat politik adalah salah karena dapat menyebabkan penyalahgunaan agama itu sendiri. Agama seharusnya menjadi sumber nilai moral dan spiritual, bukan alat untuk mencapai tujuan politik atau kekuasaan. Selain itu, menjadikan agama sebagai alat politik dapat memicu konflik dan ketegangan antar kelompok agama. Hal ini dapat mengancam keharmonisan sosial dan stabilitas masyarakat. Di Malaysia terjadi

¹ Cindy Mutia Annur. Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak#:~:text=Malaysia%20menempati%20peringkat%20kedua%20negara,57%25%20dari%20populasi%20negara%20tersebut>

konflik dengan adanya politisasi agama. Politisasi agama di Malaysia telah menyebabkan ketegangan dan konflik antara kelompok agama yang berbeda. Beberapa contoh konflik yang terjadi termasuk konflik agama Islam dan agama non-Islam. Isu-isu seperti konversi agama, penggunaan kata “Allah” oleh non-muslim dan pembangunan tempat ibadah non-muslim sering menjadi sumber perselisihan. Bahkan konflik politisasi agama juga terjadi di internal agama Islam di Malaysia. Perselisihan terkait paham keagamaan, interpretasi hukum Islam, dan perbedaan politik agama dapat memicu ketegangan antara kelompok-kelompok ini.²

Sama halnya di Malaysia, di Indonesia juga terdapat beberapa contoh konflik dari adanya politisasi agama, meliputi konflik etnis antara etnis Tionghoa dan pribumi di Indonesia, Konflik ini terutama terjadi pada masa Orde Baru dan melibatkan isu-isu seperti ekonomi, politik, dan hak-hak minoritas. Konflik agama juga pernah terjadi di Indonesia antara kelompok Islam dan Kristen Maluku pada tahun 1999-2002. Konflik ini dipicu oleh perselisihan agama dan faktor-faktor politik serta ekonomi. Penting untuk memahami bahwa setiap konflik politik berbasis agama memiliki konteks dan karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, solusi yang relevan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Upaya kolaboratif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, masyarakat sipil dan kelompok yang ada di masyarakat, diperlukan untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan dialog, rekonsiliasi, dan implementasi kebijakan yang inklusif, upaya telah dilakukan untuk membangun persatuan dan kesatuan di tengah keragaman identitas di Indonesia-Malaysia.

Selain itu, peran pemimpin dan ulama sangat penting dalam menyikapi implementasi agama sebagai alat politik di Indonesia dan Malaysia. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mempromosikan toleransi, kerukunan dan keadilan masyarakat agar tidak terjadi konflik dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin politik di kedua negara harus mampu memimpin dengan bijaksana dalam mengelola isu-isu keagamaan. Mereka harus memastikan bahwa agama tidak disalahgunakan untuk memecah belah masyarakat atau untuk kepentingan politik tertentu. Sebagai pemimpin mereka harus mempromosikan dialog antar umat beragama, mengedepankan nilai-nilai keadilan, dan menciptakan kebijakan yang inklusif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Seperti yang dilakukan salah satu institusi agama di Indonesia, yaitu Kementerian Agama yang mengajak agar menolak semua bentuk politik identitas karena membahayakan harmoni dan kerukunan masyarakat. Sebab, agama yang dijadikan sebagai alat politik memiliki banyak dampak mudarat daripada kemanfaatannya.³

² Andy Budiman. Fathi Aris Omar: Intoleransi Akan Semakin Terlihat di Malaysia. <https://www.dw.com/id/fathi-aris-omar-intoleransi-akan-semakin-terlihat-di-malaysia/a-16550275>

³ Musthofa Asrori. Ajak Tolak Politik Identitas, Ini Penjelasan Kemenag!. <https://kemenag.go.id/nasional/ajak-tolak-politik-identitas-ini-penjelasan-kemenag-gpDEu>

Sementara itu, ulama atau tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menyikapi implementasi agama sebagai alat politik. Mereka harus menjadi pilar moral masyarakat dan memberikan arahan yang benar mengenai ajaran agama, termasuk dalam konteks politik. Ulama harus mengedepankan pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan persatuan antar umat beragama, serta menolak segala bentuk ekstremisme atau intoleransi yang dapat merusak kerukunan sosial. Kerja sama antara pemimpin politik dan ulama dalam mempromosikan nilai-nilai keagamaan yang damai dan inklusif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan agama sebagai alat politik. Mereka harus bekerja sama untuk membangun masyarakat yang harmonis, menghormati perbedaan, dan menghargai pluralitas agama tanpa mengorbankan stabilitas politik dan sosial.⁴

Dengan demikian, peran pemimpin politik dan ulama dalam menyikapi implementasi agama sebagai alat politik di Indonesia dan Malaysia adalah untuk memastikan bahwa agama digunakan sebagai sumber inspirasi moral yang mempersatukan masyarakat, bukan sebagai alat untuk kepentingan politik yang sempit dan memecah belah.

⁴ Jakarta (Kemenag). Presiden Ajak Para Ulama Jaga dan Rawat Persatuan dan Persaudaraan Bangsa. <https://kemenag.go.id/nasional/presiden-ajak-para-ulama-jaga-dan-rawat-persatuan-dan-persaudaraan-bangsa-i04nkh>